

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan dalam tingkatan kebutuhan manusia merupakan salah satu kebutuhan paling dasar dan menjadi bagian dari hak asasi setiap individu. Kekurangan pangan berdampak pada instabilitas sosial, ekonomi, dan politik, sehingga ketahanan pangan menjadi salah satu penyokong utama dalam pembangunan dan ketahanan nasional suatu negara (Dirhamsyah, Mulyo, Darwanto, & Hartono, 2016). Data statistik yang dipublikasikan Kementerian Pertanian menyebutkan PDB tanaman pangan mengalami kenaikan selama lima tahun berturut-turut (2011-2015) dengan nilai masing-masing yaitu 270.977,40 - 305.670,50 - 332.111,90 - 343.252,30 - 397.408,60 miliar rupiah (Kementan RI, 2011-2015).

Ketahanan pangan menjadi salah satu isu sentral dalam pembangunan nasional di Indonesia, hal ini tercantum dalam RPJMN 2014-2019. Hal ini didasarkan pada pandangan pemerintah Indonesia bahwa isu pangan terus berkembang dan tidak hanya terbatas pada aspek ketersediaan pangan, namun juga terkait dengan upaya pembangunan pangan yang berkelanjutan dengan kualitas lebih baik (BAPPENAS, 2014).

Berdasarkan (UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan) Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi tersediaanya (ketersediaan) pangan bagi negara sampai dengan individu yang cukup jumlahnya, mutu, keamanan, beragam, bergizi, merata dan terjangkau (akses), serta sesuai dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, yang dimanfaatkan (pemanfaatan) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Menurut (Arifin, 2001) Ketahanan pangan minimal memiliki dua aspek pokok yaitu ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan, sehingga untuk mencapai status tahan pangan suatu negara wajib memenuhi dua aspek pokok tersebut. Ketersediaan pangan berkaitan dengan jumlah, kualitas, dan keberlanjutan produksi pangan yang dikonsumsi masyarakat agar terpenuhi kebutuhan kalori dan energi untuk melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari. Pengadaan pangan dapat dilakukan dengan cara produksi sendiri (produksi dalam negeri) dan impor dari negara lain dengan tetap menjaga keseimbangan perolehan devisa dari sektor lain. Sedangkan aspek aksesibilitas berkaitan dengan distribusi pangan dari produsen sampai konsumen melalui mekanisme pasar. Akses pangan juga berkaitan dengan kepemilikan sumber daya ekonomi (uang) untuk memperoleh bahan pangan dan fasilitas infrastruktur fisik yang mendukung distribusi pangan. Untuk meningkatkan aksesibilitas pangan dapat dilakukan dengan pemberdayaan sistem pasar dan mekanisme pemasaran, serta kebijakan tata niaga pangan.

Dalam panduan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Indonesia terdapat dua komponen lain yaitu aspek pemanfaatan pangan dan kerentanan terhadap kerawanan pangan transien. Pemanfaatan pangan terdiri dari dua komponen yaitu keterjangkauan rumah tangga dalam memanfaatkan pangan dan kesesuaian organ tubuh dalam memanfaatkan gizi pada pangan. Sedangkan kerentanan terhadap kerawanan pangan transien merupakan keadaan masyarakat yang berada pada resiko menjadi rawan pangan. (Dewan Ketahanan Pangan, 2009).

Kerawanan pangan antara lain terjadi karena produksi dan persediaan pangan yang rendah, sehingga kebutuhan pangan masyarakat (khususnya bahan pangan

pokok beras) tidak tercukupi. Produksi dan persediaan pangan dipengaruhi oleh luas panen dan produktivitas komoditas pangan. Selain itu kerawanan pangan juga diakibatkan oleh daya beli masyarakat yang rendah karena harga kebutuhan pangan yang fluktuatif, artinya akses secara sumber daya ekonomi (uang) rendah (Kushardono, et al., 2000). Untuk mengetahui status kerawanan pangan secara objektif maka perlu diadakan pemetaan ketahanan dan kerawanan pangan di tingkat provinsi sampai tingkat desa (Fahriyah & Siadari, 2013).

Implementasi ketahanan pangan nasional diawali dengan memenuhi kebutuhan pangan di lingkup wilayah tersempit yaitu desa sebagai basis aktivitas pertanian. Tujuan basis pembangunan wilayah perdesaan yaitu untuk merealisasikan ketahanan pangan dalam suatu wilayah yang mempunyai sarana dan prasarana yang terintegrasi (aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi) untuk mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Sehingga desa menjadi salah satu pintu masuk berbagai program pendukung tercapainya ketahanan pangan rumah tangga, yang secara kumulatif membantu tercapainya ketahanan pangan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (Naingolan, 2006).

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang mengandalkan sektor pertanian sebagai poros perekonomian daerah, hal ini terbukti dari data BPS 2015 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 14,21% (BPS Kab.Banyumas, 2017). Sehingga kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah berada di urutan tiga terbesar, dengan prosentase PDRB tahun 2015 mencapai nilai 3,86 % (BPS Provinsi Jateng, 2018).

Tabel 1. Data Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Sawah di Daerah Kerjasama Regional Barlingmascakeb (Jawa Tengah) Tahun 2017.

Kabupaten	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)
Banjarnegara	25.585	5,728	14.558,8

Purbalingga	43.479	5,396	23.461,8
Banyumas	66.210	5,349	35.418
Cilacap	148.986	5,855	87.229,8
Kebumen	73.924	5,553	41.048,9

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2017

Berdasarkan data tersebut produktivitas padi sawah Kabupaten Banyumas masih tergolong rendah yaitu 5,349 ton/ha dengan luas panen 66.210 ha. Rendahnya produktivitas berpengaruh terhadap terbatasnya produksi pangan pokok (beras). Terbatasnya produksi pangan berdampak pada terhambatnya pencapaian ketahanan pangan. Berdasarkan aspek ketersediaan pangan Kabupaten Banyumas masih perlu meningkatkan produksi pangan untuk mencapai ketahanan pangan.

Dalam aspek akses pangan prosentase penduduk miskin menjadi salah satu indikator yang menggambarkan daya beli atau akses masyarakat terhadap pangan. Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas masih tergolong tinggi, data BPS 2017 menyebutkan penduduk miskin di Kabupaten Banyumas mencapai 17,05% (BPS Jateng, 2018). Hal ini mengindikasikan daya beli atau akses masyarakat terhadap pangan di Kabupaten Banyumas masih rendah, karena kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu kondisi kelompok masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan terhadap pangan (Hermanto, 1995).

Pembangunan ketahanan pangan memerlukan perencanaan yang strategis sehingga kebijakan yang dijalankan akan tepat sasaran. Perencanaan yang dapat dijalankan salah satunya yaitu melalui identifikasi tipologi wilayah untuk mengelompokkan wilayah ketahanan pangan. Tipologi wilayah menjadi acuan dalam menyusun kebijakan ketahanan pangan berdasarkan kesamaan karakteristik wilayah pada masing-masing tipologi. Hasil dari tipologi wilayah yang didasarkan

pada aspek ketahanan pangan dapat membantu dalam menyusun kebijakan ketahanan pangan. Sehingga kajian ini cukup penting dilakukan untuk mengkaji kebijakan yang tepat sasaran dalam membangun ketahanan pangan, karena kondisi ketahanan pangan setiap wilayah berbeda-beda.

Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu kajian lebih lanjut mengenai pemetaan ketahanan pangan di tingkat kecamatan, untuk mendukung tercapainya program kawasan mandiri pangan yang dicanangkan oleh Badan Ketahanan Pangan. Penelitian ini akan mengkaji dan mendeskripsikan status ketahanan pangan Kabupaten Banyumas pada tingkat kecamatan berdasarkan indikator ketahanan pangan, berdasarkan kajian tersebut selanjutnya akan dilakukan pengelompokan dan pemetaan kecamatan berdasarkan ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis status ketahanan pangan setiap kecamatan yang kemudian dijadikan dasar dalam menyusun tipologi wilayah ketahanan pangan.

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis status ketahanan pangan kecamatan berdasarkan indikator ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas.
2. Menyusun klaster pada tingkat kecamatan berdasarkan ketahanan pangan dan menyusun alternatif kebijakan setiap klaster di Kabupaten Banyumas.

C. Kegunaan

1. Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai isu ketahanan dan kerawanan pangan.

2. Memberikan informasi mengenai kondisi dan pemetaan status ketahanan pangan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat,serta kepada seluruh stakeholder yang akan menyusun arah kebijakan pembangunan pertanian, khususnya pemerintah Kabupaten Banyumas.